

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang : a bahwa agar kekayaan daerah mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi dan dimanfaatkan secara optimal, maka perlu dipertahankan fungsi dan keberadaannya;
- b bahwa untuk mendukung kegiatan huruf a, maka diperlukan biaya operasional yang memadai ;
- c bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sudah tidak sesuai dengan potensi yang ada sehingga perlu ditinjau kembali;
- d bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1 [Undang-undang Nomor 16 tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
- 2 [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
- 3 [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
- 5 [Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000](#) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246) ;
- 6 [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
- 7 [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;
- 8 [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

- 9 [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202) ;
- 10 [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
- 11 [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
- 12 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- f. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- g. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi ;
- h. Kekayaan Daerah adalah tanah dan bangunan, ruangan, kendaraan / alat-alat berat / alat-alat besar milik Daerah;
- i. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa / pelayanan yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi / badan ;

- j. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah semua pemakaian kekayaan Daerah milik Daerah ;
- k. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial;
- l. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- n. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;
- o. SKRD Tambahan adalah Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan ;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- q. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- u. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi ;
- v. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- w. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang ;
- x. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

- 1. Obyek Retribusi adalah jasa Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2. Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Penggunaan Gedung Pertemuan Balai Kota ;
 - b. Penggunaan Gedung Taman Budaya Raden Saleh ;
 - c. Penggunaan Gedung Wisma Pancasila;
 - d. Penggunaan Gedung Pertemuan Manunggal Jati ;

- e. Penggunaan Gedung Tri Lomba Juang ;
- f. Penggunaan Gedung Juang ;
- g. Penggunaan Ruang Loka Krida dan Ruang Gedung Mr. Mochammad Ichsan ;
- h. Penggunaan Mobil Derek ;
- i. Penggunaan Mobil Ambulan;
- j. Penggunaan Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran ;
- k. Penggunaan Alat-alat Berat;
- l. Sewa Rumah milik Pemda ;
- m. Sewa Lahan .

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu dan atau luas lahan pemakaian kekayaan daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan / pemeliharaan dan biaya penyusutan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

- 1 Besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis jasa Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan

sebesar :

- a. **Penggunaan Gedung Pertemuan Balaikota Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu kali pakai.**
- b. **Penggunaan Gedung Pertemuan Taman Budaya Raden Saleh :**
 - 1 Gedung Pertemuan Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
 - 2 Gedung Theater terbuka Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
 - 3 Penggunaan Gedung Pertemuan Ki Nartosabdo Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
- c **Penggunaan Gedung Pertemuan Wisma Pancasila Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) satu kali pakai.**
- d **Penggunaan Gedung Pertemuan Gelanggang Pemuda Manunggal Jati :**
 - 1 Ruang Utama :
 - a. Hari Sabtu / Minggu / Besar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu kali pakai.
 - b. Hari biasa Senin - Jum'at Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
 - 2 Ruang Serba guna :
 - a. Hari Sabtu / Minggu; Besar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
 - b. Hari biasa Senin - Jum'at Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
 - 3 Ruang Prasmanan :
 - a. Hari Sabtu / Minggu / Besar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
 - b. Hari biasa Senin - Jum'at Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
 - 4 Ruang VIP :
 - a. Hari Sabtu / Minggu / Besar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu kali pakai.
 - b. Hari biasa Senin - Jum'at Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai.
 - 5 Ruang Kelas :
 - a. Ruang Kelas A Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) / hari.
 - b. Ruang Kelas B Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / hari.
 - c. Ruang Makan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / hari.
- e **Penggunaan Gedung Tri Lomba Juang :**
 - Lantai I Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) / m2 setiap bulan.
 - Lantai II Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) / m2 setiap bulan.
 - Ruang Serbaguna :
 - Langganan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) satu minggu satu kali pakai setiap bulan.
 - Insidentil (tanpa penerangan) Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
 - Insidentil (dengan penerangan) Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
- f **Penggunaan Gedung Juang :**
 - Gedung Pertemuan Lantai II dan III Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu kali pakai
 - Untuk Kantor Lantai VII Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / m2 pertahun
- g **Penggunaan Ruang Lokakrida dan Ruang Komisi Lantai V1 11 Gedung Mr. Mochammad Ichsan**
 - Ruang Lokakrida Lantai VIII Gedung Mr. Mochammad Ichsan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu

juta lima ratus ribu rupiah) satu kali pakai.

- Ruang Komisi Lantai VIII Gedung Mr. Mochammad Ichsan masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) satu kali pakai.

h Penggunaan Mobil Derek :

- Untuk dalam kota Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
- Untuk luar kota maksimum 50 km Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu kali pakai, lebih dari 50 km dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per km

h Penggunaan Mobil Ambulan :

- Untuk dalam kota Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai
- Untuk luar kota maksimum 50 km Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu kali pakai, lebih dari 50 km dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) / km.

j Penggunaan Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran untuk kepentingan Komersial :

- Penggunaan Mobil Unit Pemadam Kebakaran Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) / tangki /jam.
- Penggunaan Pompa Pemadam Kebakaran Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai maksimal 3 jam /hari
- Penggunaan Mobil Tangga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap jam.

k Penggunaan Alat-alat berat :

- Harga Sewa :
 - 1 Mesin Gilas Tangan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
 - 2 Mesin Gilas 1 ton Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 3 Mesin Gilas 2,5 ton Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)
 - 4 Mesin Gilas 4 ton Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 5 Mesin Gilas 6 ton Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - 6 Mesin Gilas 8 ton Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 7 Tandem Roller Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - 8 Asphalt Sprayer Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 9 Komperssor Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 10 Asphalt Finisher Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
 - 11 Tire Roller Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
 - 12 Shovel Loader Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - 13 Rock Drill Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 14 Backhoe Loader Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 15 Dum Truck kecil Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 16 Dum Truck besar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 17 Clamshell Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 18 Beton Molen / Mixer Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
 - 19 Stamper Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)
 - 20 Las Listrik Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 21 Generator Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Untuk penggunaan alat-alat tersebut di atas, maksimal 7 jam per hari, selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar 50 % dari

l Sewa Rumah Milik Pemda :

1. Rumah Sewa Tidak Bertingkat

Harga Sewa 0,2 % (Nol koma dua persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak) / bulan.

Biaya Ganti Nama kepada ahli waris 0,6 % (Nol koma enam persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

Biaya Ganti Nama kepada orang lain 2,5 % (dua koma lima persen) x NJOP PBB (Nilai Jual

Obyek Pajak).

2 Rumah Sewa Bertingkat (Rusun) :

- Harga Sewa :

Lantai 1	Harga Sewa 0,2 % (Nol koma dua persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak) / bulan.
Lantai II	0,15 % (Nol koma lima belas persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)
Lantai III	0,12 % (Nol koma dua belas persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak) .
Lantai IV	0,10 % (Nol koma sepuluh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)

- Ganti Nama / Balik Nama

Kepada Ahli Waris

Lantai 1	0,6 % (Nol koma enam persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)
Lantai II	0,5 % (Nol koma lima persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)
Lantai III	0,4 % (Nol koma empat persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)
Lantai IV	0,3 % (Nol koma tiga persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)

Ijin Persewaan :

Lantai 1	2,50 % (dua koma lima puluh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)
Lantai II	2,00 % (dua persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)
Lantai III	1,50 % (satu koma lima puluh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)
Lantai IV	1,00 % (satu persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)

Ijin Perpanjangan Persewaan :

Lantai 1	0,30 % (nol koma tiga puluh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)
Lantai II	0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)
Lantai III	0,20 % (nol koma dua puluh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)
Lantai IV	0,15 % (nol koma lima belas persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)

3 Biaya perpanjangan Ijin Perumahan

0,30 % (nol koma tiga puluh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)

4 Biaya Pencabutan / Pembebasan Ijin Perumahan

1,00 % (satu persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

m **Sewa tanah :**

1 **Taman Budaya Raden Saleh :**

a Untuk berjualan : 0,2 % (nol koma dua permil) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.

b Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya : 0,1 % (nol koma satu persen) x NJOP x Luas Lahan Terpakai

2 **Tempat Rekreasi Gua Kreo :**

Untuk berjualan : 0,2 % (nol koma dua permil) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.

Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya : 0,1 % (nol koma satu persen) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.

3 **Tempat Rekreasi Tinjomoyo :**

Untuk berjualan : 0,2 % (nol koma dua permil) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.

Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya : 0,1 % (nol koma satu persen) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.

- 4 **Tempat Rekreasi Taman Lele :**
Untuk berjualan : 0,2 % (nol koma dua permil) x NJOP x Luas Lahan Terpakai
Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya : 0,1 % (nol koma satu persen) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.
- 5 **Gelanggang Pemuda Manunggal Jati :**
Hari biasa : 0,8 % (nol koma delapan permil) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.
Hari Libur / Hari Besar : 0,1 % (nol koma satu persen) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.
- 6 **Untuk Pemasangan Reklame dilakukan dengan cara lelang sewa lahan.**
- 7 **Untuk Perdagangan / Jasa :**
Lokasi Umum : 0,2 % (nol koma dua permil) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.
Lokasi Khusus : 0,1 % (nol koma satu persen) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.
- 8 **Untuk fasilitas Umum Komersial**
10 % (sepuluh persen) x NJOP x Luas Lahan terpakai pertahun
- (2) **Penetapan harga dasar lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m angka 6 ditetapkan oleh Walikota**
- (3) **Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayaqt (1) huruf m angka 7 ditetapkan oleh Walikota**

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Kota Semarang.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat penggunaan / pemakaian jasa Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

1. Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD
2. Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota
3. Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari Retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD

Pasal 15

1. Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas
2. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
3. Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut
4. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
5. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

1. Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran
2. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
3. Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran penerimaan ditetapkan oleh Walikota

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

1. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
3. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 19

- 1 Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- 2 Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

B AB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 20

- 1 Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi.
 - b Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya
 - c Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- 2 Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD
- 3 Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana ayat (2) sudah harus memberikan keputusan
- 4 Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- 1 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota
- 2 Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi dan atau utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dan atau utang Retribusi dimaksud

Pasal 22

- 1 Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 21 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- 2 Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB
- 3 Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan Retribusi

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 23

- 1 Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak

pidana di bidang perdata

- 2 Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a Diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 24

- 1 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku
- 2 Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
 - d Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
 - e Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
 - g Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e
 - h Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
 - i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j Menghentikan penyidikan
 - k Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- 1 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang
- 2 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 Januari 2003

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H.SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 30 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd/cap

HM. SOEKAMTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2003 NOMOR I SERI C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR I TAHUN 2003 TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah agar Daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu obyek Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan sebagai Retribusi Daerah.

Mengingat bahwa biaya pengadaan dan pemeliharaan kekayaan Daerah mengalami kenaikan selaras dengan perkembangan ekonomi dan inflasi maka tarif Retribusi Pemakaian Barang Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat 1

Biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan

- a Biaya tetap, yang terdiri dari biaya penyusutan, aktiva tetap, biaya pemeliharaan aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung
- b Biaya variable, yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, beban pemasaran dan beban administrasi.
- c Volume pelayanan.
- d Keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh

pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien yang berorientasi pada harga pasar.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

angka 7

Penetapan lokasi umum dan khusus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Ayat 2

Penghitungan biaya antara lain meliputi bahan langsung, pekerja langsung, bahan tidak langsung, pekerja tidak langsung, beban pemasaran dan beban administrasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan secara selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan pada kegiatan sosial dan keagamaan

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Contoh:

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Pengajuan tuntutan ke Pengadilan Pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

---@---